



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 919 TAHUN 2023
TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT UTAMA
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, fungsi pengawasan menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien, dan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang serta untuk memberikan peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi penyimpangan/kecurangan, maka diperlukan adanya program kerja pengawasan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang sistematis dan komprehensif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 224 Tahun 2023 tentang Kebijakan Pengawasan

Inspektorat Utama Komisi Pemilihan Umum Tahun
2023-2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Jadwal pelaksanaan kegiatan Pengawasan Tahunan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU disusun berbasis analisis resiko dan merupakan acuan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan kegiatan pengawasan intern di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT : Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2023 dapat dievaluasi dan disesuaikan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi strategis, perubahan prioritas pengawasan, dan/atau perkembangan manajemen risiko di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2023

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

BERNAD DERMAWAN SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 919 TAHUN 2023
TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN
TAHUNAN INSPEKTORAT UTAMA
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI
PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN
2023

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT UTAMA
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri mempunyai visi dan misi dalam mendukung pelaksanaan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya”. Berdasarkan rencana strategis KPU Tahun 2020-2024 yang ditetapkan oleh Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2020, bahwa visi KPU periode 2020-2024 adalah “Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”, yang berarti:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak manapun disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien dan mendahulukan kepentingan umum;
3. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

Sedangkan misi KPU yaitu:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
2. Menyusun peraturan dibidang Pemilu dan Pilkada yang memberikan kepastian, hukum, progresif dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesibel;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu dan Pilkada;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu dan Pilkada untuk seluruh pemangku kepentingan.

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi KPU, maka salah satu tujuan yang ditetapkan KPU adalah “mewujudkan KPU yang mandiri, profesional dan berintegritas” dengan sasaran strategis salah satunya

terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas melalui Penilaian Akuntabilitas Kinerja Baik (B) dan Opini BPK atas Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Agar tercapai visi dan misi serta tujuan maka pimpinan lembaga wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang secara tegas dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pasal 2 ayat (1). SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melaksanakan tugas pengawasan internal di Sekretariat KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Hal tersebut secara tegas dinyatakan dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
4. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU;
5. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Ketua KPU dan/atau Sekretaris Jenderal KPU.

Berdasarkan fungsi Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU pada angka (1) diatas, kebijakan teknis Pengawasan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU perlu dijabarkan menjadi suatu program kerja pengawasan tahunan berbasis risiko Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU tahun anggaran 2023 sebagai acuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU khususnya pelaksanaan kegiatan pengawasan intern yang meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari disusunnya program kerja pengawasan tahunan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU tahun anggaran 2023 adalah sebagai pedoman bagi Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU dalam mensinergikan rencana kegiatan pengawasan intern pada tahun anggaran 2023.

Sedangkan tujuan disusunnya program kerja pengawasan tahunan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU tahun anggaran 2023 adalah agar pengawasan intern di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup program kerja pengawasan tahunan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU tahun anggaran 2023 meliputi:

1. pengawasan intern;
2. kegiatan pengawasan intern;
3. pemetaan resiko objek audit; dan
4. entitas dan jadwal pelaksanaan pengawasan.

D. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 224 Tahun 2023 tentang Kebijakan Pengawasan Inspektorat Utama Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023-2024;

BAB II
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
TAHUN ANGGARAN 2023

A. Lingkup Pengawasan Intern

Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus berperan aktif melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawas internal mulai dari persiapan tahapan Pemilu dan tahapan Pilkada, pelaksanaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Untuk itu, perwujudan peran APIP dalam unit organisasi KPU harus dapat:

1. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi KPU;
2. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi KPU;
3. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi KPU.

Dalam rangka mewujudkan kondisi tersebut, maka perlu disusun rencana Pengawasan Tahunan Tahun 2023 yang selaras dengan tujuan dan sasaran organisasi. Berdasarkan fokus, tema dan strategi pengawasan yang dituangkan dalam Kebijakan Pengawasan Tahun Anggaran 2023-2024, tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi KPU;
2. Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum;
3. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih dan bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
4. Meningkatkan keyakinan yang memadai bahwa program dan kegiatan telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan ekonomis serta sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Ruang Lingkup pengawasan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU dalam melaksanakan tugas dan fungsi:

1. Penyusunan rencana strategis, kebijakan, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja, dan program kerja;
2. Pelaksanaan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Penyusunan dan pengendalian audit operasional dan audit dengan tujuan tertentu;
4. Pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan;
5. Reviu atas rencana kerja, anggaran dan laporan keuangan;
6. Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
8. Penanganan pengaduan masyarakat dan media informasi;
9. Pelaksanaan peran serta dan kerjasama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
10. Koordinasi pengawasan dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Lainnya;
11. Pemberian keterangan saksi sebelum dan/atau dalam persidangan di pengadilan;
12. Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan serta laporan akuntabilitas kinerja;
13. Pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal; dan
14. Pelaksanaan administrasi dan pelayanan teknis Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU.

B. Kegiatan Pengawasan Intern

Kegiatan pengawasan intern Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU memperhatikan arah kebijakan dari pimpinan, pengawasan yang bersifat mandatori serta isu strategis unit organisasi, yang meliputi:

1. Kegiatan Audit

a. Audit kinerja

Audit kinerja yaitu audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas.

b. Audit Investigatif

Audit Investigatif yaitu proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan kasus-kasus dugaan pelanggaran administrasi, hambatan kelancaran pembangunan, penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara dengan hasil berupa kesimpulan dan rekomendasi untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi.

c. Audit penghitungan kerugian keuangan negara

Audit penghitungan kerugian keuangan negara merupakan audit dengan tujuan tertentu untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi.

d. Audit dengan tujuan tertentu

Audit dengan tujuan tertentu merupakan proses dan menganalisis bukti secara sistematis yang bertujuan memberikan jawaban atas laporan dugaan penyimpangan dari laporan Audit operasional, laporan masyarakat atau permintaan pimpinan.

e. *Probity* Audit

Probity diartikan sebagai integritas (*integrity*), kebenaran (*uprightness*), dan kejujuran (*honesty*). Konsep *probity* tidak hanya digunakan untuk mencegah terjadinya korupsi atau ketidakjujuran tetapi juga memastikan bahwa proses penyelenggaraan kegiatan sektor publik, seperti proses pengadaan barang/jasa, penjualan *asset*, dan pemberian sponsor/hibah dilaksanakan secara wajar, obyektif, transparan dan akuntabel. Peran sebenarnya dari *probity* Audit adalah terkait dengan pemeriksaan dan pemberian saran.

Proses pelaksanaan Audit dimulai dari tahapan sebagai berikut:

a. Perencanaan Audit

Penyusunan perencanaan audit dimulai sejak penetapan sasaran audit sampai dengan penugasan audit, dimaksudkan untuk menjamin bahwa tujuan audit tercapai sesuai dengan standar audit yang ekonomis, efisien dan efektif dan kepatuhan.

b. Pelaksanaan Audit

Pelaksanaan audit pada dasarnya merupakan operasionalisasi yang berasal dari langkah-langkah kerja yang disusun dalam program kerja Audit, meliputi pengumpulan data audit (*sampling*), pengujian

kompetensi data, pengujian atas kriteria yang telah ditetapkan, Pengembangan temuan audit dan penyusunan temuan hasil audit.

c. Komunikasi Hasil Audit

Komunikasi hasil audit meliputi konsep Laporan Hasil Audit termasuk penyusunan rekomendasi dan simpulan audit, perolehan tanggapan resmi atas rekomendasi dan penyusunan serta penyampaian Laporan Hasil Audit.

2. Kegiatan Reviu

a. Reviu laporan keuangan

Reviu laporan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas tentang akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi yang disajikan pada laporan keuangan sehingga Laporan Keuangan KPU sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah;

b. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

Reviu Rencana Kerja dan Anggaran bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga telah disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja KPU dan Pagu Anggaran serta kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja yang direncanakan dalam upaya membantu menteri/ pimpinan lembaga untuk menghasilkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga KPU yang berkualitas;

c. Reviu Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Reviu Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran bertujuan untuk menilai kesesuaian atas dokumen pendukung dengan kaidah perencanaan dan penganggaran;

d. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara

Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara bertujuan untuk memberi keyakinan terbatas (*limited assurance*) bahwa Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara telah disusun sesuai dengan ketentuan perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara;

e. Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas;

f. Reviu Pertanggungjawaban

Reviu Pertanggungjawaban bertujuan untuk memberikan keyakinan secara terbatas bahwa anggaran telah dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku;

g. Verifikasi Tunggakan Belanja Belum Dibayar

Verifikasi Tunggakan Belanja Belum Dibayar bertujuan untuk menilai tagihan atas pekerjaan/penugasan yang telah diselesaikan tahun-tahun sebelumnya tetapi belum dibayarkan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan.

Pelaksanaan Reviu dimulai dari tahapan sebagai berikut:

a. Perencanaan Reviu

Perencanaan reviu dimulai penetapan objek reviu, penetapan instrument/data reviu, penyusunan program kerja reviu dan penyusunan Tim reviu.

b. Pelaksanaan Reviu

Pelaksanaan reviu dilaksanakan berdasarkan program kerja reviu yang telah ditentukan pada tahap perencanaan dan persiapan reviu, meliputi pengumpulan data/dokumen, penelaahan dan analisa, penyusunan Catatan Hasil Reviu. Hasil pelaksanaan reviu dituangkan dalam kertas kerja reviu dan dilakukan reviu secara berjenjang oleh Ketua Tim dan Pengendali Teknis.

c. Pelaporan Hasil Reviu

Pelaporan hasil reviu mengungkapkan tujuan dan alasan pelaksanaan reviu, prosedur reviu yang dilakukan kesalahan atau kelemahan yang ditemui, langkah perbaikan yang disepakati, langkah perbaikan yang telah dilakukan dan saran perbaikan yang belum atau tidak dilakukan. Laporan Hasil Reviu disusun dalam bentuk CHR dan Laporan Hasil Reviu. Tim Pereviu harus mendokumentasikan seluruh Kertas Kerja Reviu (KKR) dengan baik dan aman.

3. Kegiatan Evaluasi

a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi kerja pemerintah;

b. Evaluasi dan Penilaian Mandiri Pembangunan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan Zona Integritas (ZI)

Evaluasi dan Penilaian Mandiri Pembangunan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan Zona Integritas (ZI) bertujuan untuk memastikan unit kerja yang diusulkan dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) menerapkan budaya antikorupsi dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sehingga layak diberikan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);

c. Evaluasi Kartu Kendali SPIP

Evaluasi Kartu Kendali SPIP bertujuan untuk mengidentifikasi apakah pelaksanaan kegiatan di bidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan Barang Milik Negara dan kinerja maupun kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara Pemilu sudah terlaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;

d. Evaluasi Kepatuhan Kartu Kendali SPIP

Evaluasi kepatuhan kartu kendali SPIP bertujuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan dapat digunakan sebagai bahan pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU.

Tahapan evaluasi sebagai berikut:

a. Persiapan Evaluasi

Tahap persiapan evaluasi dimulai dari menentukan tim evaluasi, penyusunan program kerja dan pembagian tugas, menyiapkan dan mereviu kembali perangkat yang digunakan untuk mengevaluasi pengendalian tingkat satker.

b. Pelaksanaan Evaluasi

Tahap pelaksanaan evaluasi terdiri dari pengumpulan data/informasi, pengolahan data, pembuatan simpulan hasil evaluasi, pembahasan dan pemaparan hasil evaluasi dengan Inspektur Wilayah/Kepala Biro/Kepala Pusat/Inspektur Utama/Deputi/Sekretaris Jenderal KPU/Ketua KPU.

c. Pelaporan Evaluasi

Tahap pelaporan evaluasi terdiri dari penyusunan draft laporan hasil evaluasi, reviu draft laporan hasil evaluasi dan pendistribusian laporan hasil evaluasi.

4. Kegiatan Pemantauan

- a. Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP bertujuan untuk melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan. Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP wajib dilakukan oleh pimpinan entitas yang diperiksa;

Tahap pemantauan sebagai berikut:

- 1) Menelaah dokumen rencana aksi penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK, BPKP, dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU yang telah disusun oleh satuan kerja (satker);
- 2) Melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen tindak lanjut yang disampaikan oleh satker/unit kerja;
- 3) Menyusun rekapitulasi hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP, dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU.

- b. Pemantauan atas Kepatuhan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara bertujuan untuk menilai kepatuhan ASN sebagai bentuk komitmen pembangunan integritas ASN dan upaya pencegahan korupsi.

Tahap pemantauan sebagai berikut:

- 1) Pemantauan atas pelaporan LHKPN dilakukan melalui *website* yang disediakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 2) Pemantauan atas pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara melalui *website* yang disediakan oleh Kementerian Aparatur Negara atau melalui pemantauan atas bukti penyampaian penerimaan SPT dari Unit Kerja yang di dalamnya memuat laporan harta kekayaan.

5. Kegiatan Pengawasan Lainnya

Kegiatan Pengawasan Lainnya berupa pemberian konsultasi (*consulting*) untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan efektivitas proses tata kelola dan manajemen risiko.

6. Kerjasama Pengawasan (*Joint Audit*) dengan APIP Lain

Kerjasama pengawasan (*Joint Audit*) dengan APIP lain dilakukan dengan aparat pengawasan lain yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga, BPKP maupun Inspektorat Daerah Provinsi, Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota.

C. Pemetaan Risiko Objek Audit

Pemetaan risiko objek audit digunakan sebagai alat dalam menentukan pelaksanaan audit kinerja agar ditemukan prioritas objek audit serta pelaksanaan pengawasan tidak terfokus hanya audit kinerja semata, sehingga penugasan-penugasan pengawasan intern yang bersifat *mandatory*, direktif dan tematik sesuai fokus KPU dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU. Proses pemetaan faktor risiko dilakukan oleh masing-masing auditor di Inspektorat Wilayah terkait, metode yang digunakan melalui pemetaan atas 3 faktor risiko dengan 5 kriteria skor risiko sebagaimana berikut:

1. Komponen Pemetaan Risiko

a. Total Anggaran

Faktor ini memiliki tingkatan risiko sebagai berikut:

- 1) Risiko Sangat Rendah memiliki total alokasi anggaran sampai dengan Rp5.000.000.000,00;
- 2) Risiko Rendah memiliki total alokasi anggaran di atas Rp5.000.000.000,00 sampai dengan Rp7.500.000.000,00;
- 3) Risiko Sedang memiliki total alokasi anggaran di atas Rp7.500.000.000,00 sampai dengan Rp15.000.000.000,00;
- 4) Risiko Tinggi memiliki total alokasi anggaran di atas Rp15.000.000.000,00 sampai dengan Rp35.000.000.000,00;
- 5) Risiko Sangat Tinggi memiliki total alokasi anggaran di atas Rp35.000.000.000,00.

b. Pelaksanaan Audit Sebelumnya

Faktor ini memiliki tingkatan risiko sebagai berikut:

- 1) Risiko Sangat Rendah pelaksanaan audit sebelumnya dilakukan sampai dengan 1 tahun yang lalu;
- 2) Risiko Rendah pelaksanaan audit sebelumnya dilakukan telah melewati 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
- 3) Risiko Sedang pelaksanaan audit sebelumnya dilakukan telah melewati 2 tahun sampai dengan 3 tahun;
- 4) Risiko Tinggi pelaksanaan audit sebelumnya dilakukan telah melewati 3 tahun sampai dengan 4 tahun;
- 5) Risiko Sangat Tinggi pelaksanaan audit sebelumnya telah melewati 4 tahun.

c. Kepatuhan Kartu Kendali SPIP

Faktor ini memiliki tingkatan risiko sebagai berikut:

- 1) Risiko Sangat Tinggi
- 2) Risiko Tinggi
- 3) Risiko Sedang
- 4) Risiko Rendah
- 5) Risiko Sangat Rendah

2. Skor Analisa Risiko

Faktor risiko yang telah disusun memiliki 5 tingkatan skor sebagai berikut:

- a. Risiko Sangat Rendah : 1
- b. Risiko Rendah : 2
- c. Risiko Sedang : 3
- d. Risiko Tinggi : 4
- e. Risiko Sangat Tinggi : 5

3. Matriks Pemetaan Risiko

No	Faktor Risiko	Kriteria	Skor	Keterangan
1	Total Anggaran Tahun 2022 dan 2023	≤ Rp5 miliar	1	Risiko Sangat Rendah
		>Rp5 miliar s.d. ≤ Rp7,5 miliar	2	Risiko Rendah
		>Rp7,5 miliar s.d. ≤ Rp15 miliar	3	Risiko Sedang
		>Rp15 miliar s.d. ≤ Rp35 miliar	4	Risiko Tinggi
		>Rp35 miliar	5	Risiko Sangat Tinggi
2	Pelaksanaan Audit Sebelumnya	0 s.d 1 tahun	1	Risiko Sangat Rendah
		1 tahun s.d 2 tahun	2	Risiko Rendah
		2 tahun s.d 3 tahun	3	Risiko Sedang
		3 tahun s.d 4 tahun	4	Risiko Tinggi
		>5 tahun (belum pernah diaudit)	5	Risiko Sangat Tinggi

No	Faktor Risiko	Kriteria	Skor	Keterangan
3	Kepatuhan Kartu Kendali SPIP	100%	1	Risiko Sangat Rendah
		90,01 s.d. 99,99%	2	Risiko Rendah
		80,01 s.d. 90%	3	Risiko Sedang
		70,01 s.d. 80%	4	Risiko Tinggi
		0 s.d. 70%	5	Risiko Sangat Tinggi

Selain faktor anggaran, pelaksanaan audit sebelumnya, serta kepatuhan kartu kendali SPIP, faktor lain yang menjadi pertimbangan dalam penentuan kegiatan dan objek pengawasan diantaranya unit kerja yang sedang berurusan dengan aparat penegak hukum maupun arahan pimpinan, kegiatan pengawasan yang bersifat mandatori serta isu strategis unit organisasi.

D. Entitas dan Jadwal Pelaksanaan Pengawasan

Entitas dan jadwal pelaksanaan pengawasan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU pada tahun anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Pengawasan pada Inspektorat Wilayah I sebanyak 612 (enam ratus dua belas) entitas, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan Pengawasan	Jumlah Satker	Total Anggaran	Jumlah Output
1	Audit			
	a Audit Kinerja/Operasional	1	60.475.000	1
	b Audit dengan tujuan tertentu	1	62.000.000	1
2	Reviu			
	a Reviu Laporan Keuangan	183	497.000.000	24
	b Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara	1	15.000.000	1
	c Reviu Pertanggungjawaban	7	352.040.000	6
3	Evaluasi			
	a Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	19	125.000.000	7
	b Evaluasi dan Penilaian Mandiri Pembangunan	8	118.000.000	6

No	Jenis Kegiatan Pengawasan	Jumlah Satker	Total Anggaran	Jumlah Output
	Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan Zona Integritas (ZI)			
c	Evaluasi Kartu Kendali SPIP	183	0	11
4	Kegiatan Pemantauan			
a	Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK BPKP dan APIP	17	743.000.000	14
b	Pemantauan atas Kepatuhan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	187	0	15
5	Kegiatan Pengawasan Lainnya			
a	Pemberian Konsultasi	5	190.960.000	2
Jumlah		612	2.163.475.000	88

2. Pengawasan pada Inspektorat Wilayah II sebanyak 605 (enam ratus lima) entitas, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan Pengawasan	Jumlah Satker	Total Anggaran	Jumlah Output
1	Audit			
a	Audit Kinerja/Operasional	7	396.000.000	7
b	Audit dengan tujuan tertentu	5	260.000.000	5
c	Probitas	1	64.040.000	5
2	Reviu			
a	Reviu Laporan Keuangan	184	230.000.000	24
b	Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga	1	4.800.000	1
c	Reviu Pertanggungjawaban	8	176.018.000	14
3	Evaluasi			
a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4	139.000.000	4
b	Evaluasi Kartu Kendali SPIP	184	0	12

No	Jenis Kegiatan Pengawasan	Jumlah Satker	Total Anggaran	Jumlah Output
4	Kegiatan Pemantauan			
	a Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK BPKP dan APIP	9	522.000.000	9
	b Pemantauan atas Kepatuhan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	189	0	17
5	Kegiatan Pengawasan Lainnya			
	a Pemberian Konsultasi	13	371.142.000	18
6	Ketatausahaan dan Dokumentasi Laporan Hasil Pengawasan	0	3.510.025.000	0
Jumlah		605	5.673.025.000	116

3. Pengawasan pada Inspektorat Wilayah III sebanyak 599 (lima ratus sembilan puluh sembilan) entitas, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan Pengawasan	Jumlah Satker	Total Anggaran	Jumlah Output
1	Audit			
	a Audit Kinerja/Operasional	2	81.000.000	2
	b Audit dengan tujuan tertentu	3	172.000.000	3
2	Reviu			
	a Reviu Laporan Keuangan	182	0	22
	b Reviu Pertanggungjawaban	5	76.850.000	5
3	Evaluasi			
	a Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	8	194.416.000	8
	b Evaluasi dan Penilaian Mandiri Pembangunan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan Zona Integritas (ZI)	4	167.815.000	4
	c Evaluasi Kartu Kendali SPIP	182	0	11

No	Jenis Kegiatan Pengawasan	Jumlah Satker	Total Anggaran	Jumlah Output
d	Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan SPIP	3	184.000.000	3
4	Kegiatan Pemantauan			
a	Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK BPKP dan APIP	21	1.099.687.000	21
b	Pemantauan atas Kepatuhan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	185	0	14
5	Kegiatan Pengawasan Lainnya			
a	Pemberian Konsultasi	4	187.732.000	4
Jumlah		599	2.163.500.000	97

BAB III
PENUTUP

Program kerja pengawasan tahunan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU tahun anggaran 2023 disusun agar pengawasan intern Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU menjadi lebih terarah, efektif dan efisien. Program kerja pengawasan tahunan juga diharapkan dapat meningkatkan komitmen pelaksanaan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan komitmen perencanaan pengawasan intern yang ditetapkan dapat terealisasi. Program kerja pengawasan tahunan disusun agar seluruh rangkaian pengawasan intern mempunyai keluaran untuk menghasilkan rekomendasi yang berdampak terhadap perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

BERNAD DERMAWAN SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 919 TAHUN 2023
TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN
TAHUNAN INSPEKTORAT UTAMA
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI
PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN
2023

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT
UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN
ANGGARAN 2023

**KEGIATAN PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT WILAYAH I
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN	DASAR UNIT KERJA/SATKER DITETAPKAN MENJADI SAMPLE KEGIATAN PENGAWASAN				DAMPAK JIKA TIDAK DILAKUKAN PENGAWASAN	
			TINGKAT RISIKO	URAIAN RISIKO	TUJUAN KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN		JUMLAH PERSONIL
AE	Pengawasan Lainnya Inspektorat Wilayah 1	676.000.000						
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	553.000.000						
2	Wilayah Provinsi Kepulauan Riau - Reviu Pertanggungjawaban	55.773.000	4	Risiko Tinggi	Memberikan keyakinan terbatas bahwa pengelolaan keuangan pada satuan kerja terkait telah sesuai dengan peraturan yang berlaku	Bulan Oktober 2023	5 orang	pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban pada satuan kerja tidak dapat dipastikan kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku
3	Wilayah Provinsi Kepulauan Riau - Bimtek MR	40.573.000	4	Risiko Tinggi	Untuk mengidentifikasi risiko dalam menghadapi tahapan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024	Bulan September 2023	4 orang	risiko tidak dapat dipetakan dan dimitigasi oleh satuan kerja
5	KPU Kabupaten Pematang - Reviu Pertanggungjawaban	49.932.000	3	Risiko Sedang	Memberikan keyakinan terbatas bahwa pengelolaan keuangan pada satuan kerja terkait telah sesuai dengan peraturan yang berlaku	Bulan September 2023	5 orang	pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban pada satuan kerja tidak dapat dipastikan kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku
6	KPU Kabupaten Wonogiri - Reviu Pertanggungjawaban	41.770.000	4	Risiko Tinggi	Memberikan keyakinan terbatas bahwa pengelolaan keuangan pada satuan kerja terkait telah sesuai dengan peraturan yang berlaku	Bulan Oktober 2023	5 orang	pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban pada satuan kerja tidak dapat dipastikan kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku
7	Bimtek MR pada KPU Provinsi Riau	40.807.000	4	Risiko Tinggi	Untuk mengidentifikasi risiko dalam menghadapi tahapan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024	Bulan Oktober 2023	5 orang	tidak teridentifikasinya risiko perihal penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024
8	Reviu Pertanggungjawaban Pada KPU Kota Dumai	51.700.000	3	Risiko Sedang	Memberi keyakinan bahwa Pertanggungjawaban APBN Tahun 2023 pada KPU Kota Dumai sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Bulan November 2023	5 Orang	potensi tidak/belum lengkapnya SPJ dan terjadinya kesalahan pencatatan
10	KPU Kabupaten Buton Utara - Reviu Pertanggungjawaban	61.765.000	3	Risiko Sedang	Memberikan keyakinan terbatas bahwa pengelolaan keuangan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	September 2023	5 orang	pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban pada satuan kerja tidak dapat dipastikan kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku
11	Reviu SPJ KPU Kabupaten Banjar	58.100.000	4	Risiko Tinggi	Memberi keyakinan bahwa Pertanggungjawaban APBN Tahun 2023 pada KPU Kabupaten Banjar sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Bulan November 2023	5 Orang	potensi tidak/belum lengkapnya SPJ dan terjadinya kesalahan pencatatan
12	Bimtek Manajemen Risiko Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan	34.580.000	4	Risiko Tinggi	Untuk mengidentifikasi risiko dalam menghadapi tahapan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024	Bulan Juni 2023	4 Orang	tidak teridentifikasinya risiko perihal penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024
14	Pengendalian Gratifikasi (LHKPN/ASN Aksi PPK WBS ZI) di Wilayah Provinsi Banten	19.334.000	4	Risiko Tinggi	Agar pelaksanaan pembangunan Zona Integritas lebih terarah sebelum dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN) serta agar Satuan kerja mengetahui apa saja yang harus dipersiapkan dalam penilaian Zona Integritas	1. Mei 2023 2. Juli 2023	4 orang	Nilai pada LKE ZI tidak memenuhi persyaratan dan gagal seleksi administrasi
15	Pengendalian Gratifikasi (LHKPN/ASN Aksi PPK WBS ZI) di Kota Tangerang	16.457.000	3	Risiko Sedang	Agar pelaksanaan pembangunan Zona Integritas lebih terarah sebelum dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN) serta agar Satuan kerja mengetahui apa saja yang harus dipersiapkan dalam penilaian Zona Integritas	1. Mei 2023 2. Juli 2023	4 orang	Nilai pada LKE ZI tidak memenuhi persyaratan dan gagal seleksi administrasi
16	Pengendalian Gratifikasi (LHKPN/ASN Aksi PPK WBS ZI) di KPU Provinsi NTT	39.980.000	4	Risiko Tinggi	untuk memastikan bahwa unit kerja pada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi NTT mengetahui apa saja yang harus dipersiapkan dalam penilaian Zona Integritas oleh TPN	Bulan November 2023	4 orang	Nilai pada LKE ZI tidak memenuhi persyaratan dan gagal seleksi administrasi
17	Pengendalian Gratifikasi (LHKPN/ASN Aksi PPK WBS ZI) di Wilayah Maluku Utara	42.229.000	5	Risiko Sangat Tinggi	Agar pelaksanaan pembangunan Zona Integritas lebih terarah sebelum dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN) serta agar Satuan kerja mengetahui apa saja yang harus dipersiapkan dalam penilaian Zona Integritas	Bulan Desember 2023	4 orang	Nilai pada LKE ZI tidak memenuhi persyaratan dan gagal seleksi administrasi
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	123.000.000						

KODE	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN	DASAR UNIT KERJA/SATKER DITETAPKAN MENJADI SAMPLE KEGIATAN PENGAWASAN					DAMPAK JIKA TIDAK DILAKUKAN PENGAWASAN
			TINGKAT RISIKO	URAIAN RISIKO	TUJUAN KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN	JUMLAH PERSONIL	
1	Pengawasan Lainnya di Biro Wilayah 1.1	45.000.000	4	Risiko Tinggi	Memberi keyakinan bahwa Pertanggungjawaban APBN Tahun 2023 pada Biro Umum dan Biro SDM telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Bulan Januari - Mei 2023 dan Bulan Agustus 2023	12 orang	potensi tidak/belum lengkapnya SPJ dan terjadinya kesalahan pencatatan
2	Pengawasan Lainnya di Biro Perencanaan dan Organisasi	30.000.000	3	Risiko Sedang	Memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi usulan revisi anggaran sesuai dengan RKP, Renja-K/L, dan Pagu Anggaran serta kesesuaian dengan standar biaya, kaidah-kaidah penganggaran dan dilengkapi dokumen pendukung usulan tambahan anggaran	Bulan Agustus 2023	5 Orang	Revisi anggaran tidak sesuai dengan kaidah perencanaan dan penganggaran
3	Reviu Pertanggungjawaban di Biro Keuangan dan BMN	15.000.000	2	Risiko Rendah	Memberi keyakinan bahwa Pertanggungjawaban APBN Tahun 2023 pada Biro Keuangan dan BMN sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Bulan Agustus 2023	7 Orang	potensi tidak/belum lengkapnya SPJ dan terjadinya kesalahan pencatatan
4	Reviu RKBMN di Biro Keuangan dan BMN	15.000.000	2	Risiko Rendah	Memberikan keyakinan bahwa penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara telah disusun berdasarkan analisis kebutuhan secara optimal serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Juli dan Oktober 2023	7 Orang	kebutuhan BMN tidak dapat diidentifikasi secara tepat
5	Reviu Pertanggungjawaban di Biro Perencanaan dan Organisasi	18.000.000	3	Risiko Sedang	Memberi keyakinan bahwa Pertanggungjawaban APBN Tahun 2023 pada Biro Perencanaan dan Organisasi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Bulan September 2023	5 Orang	potensi tidak/belum lengkapnya SPJ dan terjadinya kesalahan pencatatan
AJ	Laporan Hasil Pemeriksaan Penjaminan Mutu (Quality Assurance) pada Inspektorat Wilayah 1	619.475.000						
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	574.475.000						
1	Pemeriksaan Audit Operasional Tahun 2023 di Kota Lhokseumawe	60.475.000	3	Risiko Sedang	Memberikan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan KPU terkait telah sesuai dengan peraturan yang berlaku	Bulan November 2023	7 orang	Potensi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu di Kab. Bolaang Mongondow Timur (Sulawesi Utara)	62.000.000	3	Risiko Sedang	Memberikan keyakinan atas pelaksanaan kegiatan, program, atau hal lainnya telah sesuai dengan aturan yang berlaku	Bulan September 2023	6 orang	Potensi terdapat pelanggaran terhadap aturan yang berlaku
3	Reviu Laporan Keuangan di Provinsi Aceh	86.153.000	4	Risiko Tinggi	Memberikan keyakinan terbatas atas akurasi, keandalan dan keabsahan informasi dalam LK	Bulan Februari dan Bulan Juli 2023	5 orang	LK yang disusun tidak sesuai dengan SAP
4	Reviu Laporan Keuangan di Wilayah Provinsi Banten	34.572.000	4	Risiko Tinggi	Memberikan keyakinan terbatas atas akurasi, keandalan dan keabsahan informasi dalam LK	Bulan Februari dan Bulan Juli 2023	4 orang	LK yang disusun tidak sesuai dengan SAP
5	Reviu Laporan Keuangan di Provinsi NTT	90.020.000	4	Risiko Tinggi	Memberikan keyakinan terbatas atas akurasi, keandalan dan keabsahan informasi dalam LK	Bulan Februari dan Bulan Juli 2023	6 orang	LK yang disusun tidak sesuai dengan SAP
6	Reviu Laporan Keuangan di Provinsi Sulawesi Utara	98.988.000	3	Risiko Sedang	Memberikan keyakinan terbatas atas akurasi, keandalan dan keabsahan informasi dalam LK	Bulan Februari dan Bulan Juli 2023	5 orang	LK yang disusun tidak sesuai dengan SAP
7	Reviu Laporan Keuangan di Provinsi Bengkulu	41.682.000	3	Risiko Sedang	Memberikan keyakinan terbatas atas akurasi, keandalan dan keabsahan informasi dalam LK	4 - 7 Februari 2023 dan Bulan Juli 2023	4 orang	LK yang disusun tidak sesuai dengan SAP
8	Reviu Laporan Keuangan di Provinsi Wilayah Maluku Utara	100.585.000	5	Risiko Sangat Tinggi	Memberikan keyakinan terbatas atas akurasi, keandalan dan keabsahan informasi dalam LK	Bulan Februari dan Bulan Juli 2023	5 orang	LK yang disusun tidak sesuai dengan SAP
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	45.000.000						
1	Reviu LK di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU 1.2	45.000.000	3	Risiko Sedang	Memberikan keyakinan terbatas atas laporan keuangan yang disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.	Februari, Agustus 2023	15 orang	LK yang disusun tidak sesuai dengan SAP
AK	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penjaminan Mutu (Quality Assurance) pada Inspektorat Wilayah 1	868.000.000						
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	868.000.000						
1	Tindak Lanjut Temuan Inspektorat BPKP dan BPK di Provinsi Aceh	46.963.000	4	Risiko Tinggi	Menindaklanjuti sisa rekomendasi atas temuan yang belum sesuai dan belum ditindaklanjuti	bulan September 2023	5 orang	sisa rekomendasi temuan tidak ditindaklanjuti
2	Tindak Lanjut Temuan Inspektorat BPKP dan BPK di Kabupaten Sumba Barat Daya (NTT)	43.932.000	4	Risiko Tinggi	Menindaklanjuti sisa rekomendasi atas temuan yang belum sesuai dan belum ditindaklanjuti	Bulan Oktober 2023	4 orang	sisa rekomendasi pemeriksaan tidak ditindaklanjuti
3	Tindak Lanjut Temuan Inspektorat BPKP dan BPK di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Sulawesi Utara)	44.368.000	3	Risiko Sedang	Menindaklanjuti sisa rekomendasi atas temuan yang belum sesuai dan belum ditindaklanjuti	Bulan Februari 2023	4 orang	sisa rekomendasi pemeriksaan tidak ditindaklanjuti

KODE	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN	DASAR UNIT KERJA/SATKER DITETAPKAN MENJADI SAMPLE KEGIATAN PENGAWASAN					DAMPAK JIKA TIDAK DILAKUKAN PENGAWASAN
			TINGKAT RISIKO	URAIAN RISIKO	TUJUAN KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN	JUMLAH PERSONIL	
4	Tindak Lanjut Temuan Inspektorat BPKP dan BPK di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Sulawesi Utara)	58.443.000	2	Risiko Rendah	Menindaklanjuti sisa rekomendasi atas temuan yang belum sesuai dan belum ditindaklanjuti	Bulan April 2023	5 orang	sisa rekomendasi pemeriksaan tidak ditindaklanjuti
5	Tindak Lanjut Temuan Inspektorat BPKP dan BPK di Kabupaten Lebong	34.284.000	3	Risiko Sedang	Menindaklanjuti temuan atas atas sisa rekomendasi pada Laporan Hasil Reviu BPKP yang belum sesuai dan belum ditindaklanjuti	13 - 16 April 2023	6 orang	sisa rekomendasi temuan tidak ditindaklanjuti
6	Tindak Lanjut Temuan Inspektorat BPKP dan BPK di Kabupaten Pulau Taliabu (Maluku Utara) - di kantor KPU Provinsi	60.201.000	4	Risiko Tinggi	Menindaklanjuti sisa rekomendasi atas temuan yang belum sesuai dan belum ditindaklanjuti	Bulan Agustus 2023	6 orang	sisa rekomendasi pemeriksaan tidak ditindaklanjuti
7	Tindak Lanjut Temuan Inspektorat BPKP dan BPK di Kabupaten Halmahera Selatan (Maluku Utara)	54.104.000	4	Risiko Tinggi	Menindaklanjuti sisa rekomendasi atas temuan yang belum sesuai dan belum ditindaklanjuti	Bulan September 2023	6 orang	sisa rekomendasi pemeriksaan tidak ditindaklanjuti
8	Tindak Lanjut Temuan Inspektorat BPKP dan BPK di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau	47.099.000	3	Risiko Sedang	Menindaklanjuti sisa rekomendasi atas temuan yang belum sesuai dan belum ditindaklanjuti	July 2023	5 orang	sisa rekomendasi temuan tidak ditindaklanjuti
9	Tindak Lanjut Temuan Inspektorat BPKP dan BPK di KPU Kabupaten Kampar	46.096.000	3	Risiko Sedang	Menindaklanjuti sisa rekomendasi atas temuan yang belum sesuai dan belum ditindaklanjuti	Bulan Agustus 2023	5 orang	sisa rekomendasi temuan tidak ditindaklanjuti
10	Tindak Lanjut Temuan Inspektorat BPKP dan BPK di KPU Kabupaten Kepulauan Meranti	46.700.000	3	Risiko Sedang	Menindaklanjuti sisa rekomendasi atas temuan yang belum sesuai dan belum ditindaklanjuti	Bulan April 2023	5 orang	sisa rekomendasi temuan tidak ditindaklanjuti
11	Tindak Lanjut Temuan Inspektorat BPKP dan BPK di KPU Kabupaten Tanah Bumbu	64.240.000	3	Risiko Sedang	Menindaklanjuti sisa rekomendasi atas temuan yang belum sesuai dan belum ditindaklanjuti	Bulan Desember 2023	5 orang	sisa rekomendasi temuan tidak ditindaklanjuti
12	Tindak Lanjut Temuan Inspektorat BPKP dan BPK di KPU Kabupaten Batang	40.906.000	4	Risiko Tinggi	Menindaklanjuti sisa rekomendasi atas temuan yang belum sesuai dan belum ditindaklanjuti	Bulan Juli 2023	5 orang	sisa rekomendasi temuan tidak ditindaklanjuti
13	Tindak Lanjut Temuan Inspektorat BPKP dan BPK di KPU Kabupaten Tegal	41.106.000	4	Risiko Tinggi	Menindaklanjuti sisa rekomendasi atas temuan yang belum sesuai dan belum ditindaklanjuti	Bulan Agustus 2023	5 orang	sisa rekomendasi temuan tidak ditindaklanjuti
14	Tindak Lanjut Temuan Inspektorat BPKP dan BPK di KPU Kabupaten Konawe Kepulauan	60.728.000	3	Risiko Sedang	Menindaklanjuti sisa rekomendasi atas temuan yang belum sesuai dan belum ditindaklanjuti	March 2023	4 orang	sisa rekomendasi temuan tidak ditindaklanjuti
15	Tindak Lanjut Temuan Inspektorat BPKP dan BPK di KPU Kabupaten Konawe Selatan	53.830.000	3	Risiko Sedang	Menindaklanjuti sisa rekomendasi atas temuan yang belum sesuai dan belum ditindaklanjuti	April 2023	4 orang	sisa rekomendasi temuan tidak ditindaklanjuti
16	Monitoring Evaluasi LAKIP di Provinsi Kepulauan Riau	28.210.000	4	Risiko Tinggi	1. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP; 2. menilai tingkat implementasi SAKIP; 3. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan 4. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya	Junii/ Juli 2023	4 orang	Tidak dapat menilai tingkat implementasi SAKIP pada satuan kerja
17	Monitoring Evaluasi LAKIP di Wilayah Provinsi Riau	28.745.000	4	Risiko Tinggi	1. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP; 2. menilai tingkat implementasi SAKIP; 3. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan 4. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya	Junii/ Juli 2023	4 orang	Tidak dapat menilai tingkat implementasi SAKIP pada satuan kerja
18	Monitoring Evaluasi LAKIP di Wilayah Provinsi Jawa Tengah	30.506.000	3	Risiko Sedang	1. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP; 2. menilai tingkat implementasi SAKIP; 3. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan 4. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya	Bulan Juni 2023	4 orang	Tidak dapat menilai tingkat implementasi SAKIP pada satuan kerja
19	Monitoring Evaluasi LAKIP di Wilayah Sulawesi Tenggara	37.539.000	3	Risiko Sedang	1. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP; 2. menilai tingkat implementasi SAKIP; 3. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan 4. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya	June 2023	3 orang	Tidak dapat menilai tingkat implementasi SAKIP pada satuan kerja

**KEGIATAN PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT WILAYAH II
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN	DASAR UNIT KERJA/SATKER DITETAPKAN MENJADI SAMPLE KEGIATAN PENGAWASAN					DAMPAK JIKA TIDAK DILAKUKAN PENGAWASAN
			TINGKAT RISIKO	URAIAN RISIKO	TUJUAN KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN	JUMLAH PERSONIL	
965	Pemeriksaan Internal KPU Wilayah II	5.673.025.000						
BA	Ketatausahaan dan Dokumentasi Laporan Hasil Pengawasan	3.510.025.000						
BE	Laporan Pengawasan Lainnya Inspektorat Wilayah II	616.000.000						
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	456.000.000						
1	Bimtek Manajemen Risiko Wilayah Jawa Timur	18.520.000	3	Risiko Sedang	Untuk mengidentifikasi risiko dalam menghadapi tahapan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024	November s.d Desember 2023	3 orang	Risiko tidak terpetakan
2	Pelaksanaan Pendampingan BPK di Wilayah Jawa Timur	26.252.000	4	Risiko Tinggi	Untuk memfasilitasi BPK dalam pemenuhan dokumen yang akan diperiksa dan meminimalisir temuan BPK	February 2023	3 orang	potensi terjadinya fraud
3	Reviu Pertanggungjawaban/SPJ di KPU Provinsi Jawa Timur dan 1 KPU Kabupaten/Kota	43.828.000	3	Risiko Sedang	Untuk memberikan jaminan bahwa pertanggungjawaban/SPJ yang dikelola sesuai dengan aturan yang berlaku dan memberikan peringatan dini apabila terdapat penyimpangan	January 2023	5 orang	potensi tidak/belum lengkapnya SPJ dan terjadinya kesalahan pencatatan
4	Pelaksanaan Pendampingan BPK di Wilayah Kalimantan Timur	42.350.000	4	Risiko Tinggi	Untuk memfasilitasi BPK dalam pemenuhan dokumen yang akan diperiksa dan meminimalisir temuan BPK	January 2023	5 orang	Jika BPK tidak terfasilitasi risiko temuan tinggi
5	Reviu Pertanggungjawaban/SPJ di KPU Provinsi Kalimantan Timur dan 1 KPU Kabupaten/Kota	51.157.000	4	Risiko Tinggi	Untuk memberikan jaminan bahwa pertanggungjawaban/SPJ yang dikelola sesuai dengan aturan yang berlaku dan memberikan peringatan dini apabila terdapat penyimpangan	September 2023	5 orang	potensi tidak/belum lengkapnya SPJ dan terjadinya kesalahan penyimpangan
6	Pelaksanaan Pendampingan BPK di Wilayah Lampung	51.856.000	4	Risiko Tinggi	Untuk memfasilitasi BPK dalam pemenuhan dokumen yang akan diperiksa dan meminimalisir temuan BPK	January 2023	3 orang	Jika BPK tidak terfasilitasi risiko temuan tinggi
7	Reviu Pertanggungjawaban/SPJ di KPU Provinsi Lampung dan 1 KPU Kabupaten/Kota	33.033.000	4	Risiko Tinggi	Untuk memberikan jaminan bahwa pertanggungjawaban/SPJ yang dikelola sesuai dengan aturan yang berlaku dan memberikan peringatan dini apabila terdapat penyimpangan	January 2023	5 orang	potensi tidak/belum lengkapnya SPJ dan terjadinya kesalahan penyimpangan
9	Bimtek Manajemen Risiko Wilayah Provinsi Gorontalo	25.548.000	3	Risiko Sedang	Untuk mengidentifikasi risiko dalam menghadapi tahapan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024	August 2023	3 orang	tidak teridentifikasinya risiko perihal penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024
10	Bimtek Manajemen Risiko Wilayah DIY	17.634.000	3	Risiko Sedang	Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik perihal manajemen risiko penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024	April 2023	3 orang	tidak teridentifikasinya risiko perihal penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024
11	Pengawasan Lainnya di Wilayah Provinsi Sumatera Utara	35.870.000	4	Risiko Tinggi	Untuk memberikan jaminan bahwa pertanggungjawaban/SPJ yang dikelola sesuai dengan aturan yang berlaku dan memberikan peringatan dini apabila terdapat penyimpangan	Maret 2023, Mei 2023, September 2023	3 orang	potensi tidak/belum lengkapnya SPJ dan terjadinya kesalahan penyimpangan
13	Bimtek Manajemen Risiko Wilayah Provinsi Jambi	37.592.000	4	Risiko Tinggi	Untuk mengidentifikasi risiko dalam menghadapi tahapan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024 pada Wilayah Sumatera Utara	July 2023	3 orang	tidak teridentifikasinya risiko perihal penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024
14	Pengawasan Lainnya di Wilayah Provinsi Papua Barat	72.360.000	3	Risiko Sedang	Untuk memberikan jaminan bahwa pertanggungjawaban/SPJ yang dikelola sesuai dengan aturan yang berlaku dan memberikan peringatan dini apabila terdapat penyimpangan	Mei 2023, November 2023	5 orang	potensi tidak/belum lengkapnya SPJ dan terjadinya kesalahan penyimpangan
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	160.000.000						
1	Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang Jasa	15.000.000	3	Risiko Sedang	untuk memastikan penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Maret, Juni, September, November 2023	5 orang	tidak terlaporinya realisasi penyerapan anggaran dan PBJ ke BPKP
2	Reviu P3DN	11.250.000	4	Risiko Tinggi	untuk menilai kadar TKDN pada pengadaan barang/jasa pada KPU	Mei, Agustus dan November 2023	5 orang	risiko temuan BPK
3	Reviu Pertanggungjawaban/SPJ Biro Logistik	11.250.000	4	Risiko Tinggi	Untuk memberikan jaminan bahwa pertanggungjawaban/SPJ yang dikelola sesuai dengan aturan yang berlaku dan memberikan peringatan dini apabila terdapat penyimpangan	Juni dan November 2023	5 orang	potensi tidak/belum lengkapnya SPJ dan terjadinya kesalahan penyimpangan
4	Reviu Pertanggungjawaban/SPJ Biro Teknis	11.250.000	3	Risiko Sedang	Untuk memberikan jaminan bahwa pertanggungjawaban/SPJ yang dikelola sesuai dengan aturan yang berlaku dan memberikan peringatan dini apabila terdapat penyimpangan	January 2023	5 orang	potensi tidak/belum lengkapnya SPJ dan terjadinya kesalahan pencatatan
5	Probity Audit	15.000.000	4	Risiko Tinggi	untuk memastikan proses PBJ tahapan Pemilu di Biro Logistik dilaksanakan sesuai tahapan dan peraturan yang berlaku	Februari, Juni, Agustus 2023	5 orang	tidak terpantaunya proses PBJ tahapan Pemilu di Biro Logistik
6	Pemeriksaan Pada Sekretariat Jenderal KPU (Biro Parhupmas)	13.500.000	4	Risiko Tinggi	Untuk memberikan jaminan bahwa pertanggungjawaban/SPJ yang dikelola sesuai dengan aturan yang berlaku dan memberikan peringatan dini apabila terdapat penyimpangan	Januari 2023 Oktober 2023	6 orang	potensi tidak/belum lengkapnya SPJ dan terjadinya kesalahan pencatatan
7	Pemeriksaan Pada Sekretariat Jenderal KPU (Biro PUU)	6.000.000	4	Risiko Tinggi	Untuk memberikan jaminan bahwa pertanggungjawaban/SPJ yang dikelola sesuai dengan aturan yang berlaku dan memberikan peringatan dini apabila terdapat penyimpangan	Januari 2023, Oktober 2023	5 orang	potensi tidak/belum lengkapnya SPJ dan terjadinya kesalahan pencatatan

KODE	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN	DASAR UNIT KERJA/SATKER DITETAPKAN MENJADI SAMPLE KEGIATAN PENGAWASAN					DAMPAK JIKA TIDAK DILAKUKAN PENGAWASAN
			TINGKAT RISIKO	URAIAN RISIKO	TUJUAN KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN	JUMLAH PERSONIL	
8	Pemeriksaan Pada Sekretariat Jenderal KPU (Biro AHPS)	6.000.000	4	Risiko Tinggi	Untuk memberikan jaminan bahwa pertanggungjawaban/SPJ yang dikelola sesuai dengan aturan yang berlaku dan memberikan peringatan dini apabila terdapat penyimpangan	Januari 2023, Oktober 2023	6 orang	potensi tidak/belum lengkapnya SPJ dan terjadinya kesalahan pencatatan
9	Pengawasan lain pada Wilayah KPU DKI Jakarta	10.490.000	3	Risiko Sedang	Untuk memberikan jaminan bahwa pertanggungjawaban/SPJ yang dikelola sesuai dengan aturan yang berlaku dan memberikan peringatan dini apabila terdapat penyimpangan	Januari 2023, April 2023, Juni 2023	5 orang	potensi tidak/belum lengkapnya SPJ dan terjadinya kesalahan penyimpangan
10	Bimtek Manajemen Risiko pada Wilayah KPU DKI Jakarta	6.420.000	3	Risiko Sedang	Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik perihal manajemen risiko penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024	July 2023	5 orang	tidak teridentifikasinya risiko perihal penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024
11	Reviu RKAKL Laporan Hasil Reviu RKA-K/L Wilayah II.2	4.800.000	4	Risiko Tinggi	untuk memastikan tidak terdapat selisih pada LK	January 2023	6 orang	risiko terdapat selisih pada LK
12	Sampling Penyedia Probitas Audit (Logistik)	49.040.000	4	Risiko Tinggi	untuk memastikan proses PBJ tertentu di Biro Logistik dilaksanakan sesuai tahapan dan peraturan yang berlaku	Juli s.d September 2023	6 orang	risiko penyimpangan dalam proses PBJ
BJ	Pemeriksaan dalam rangka Penjaminan Mutu di Inspektorat Wilayah 2	656.000.000						
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	656.000.000						
1	Pemeriksaan Anggaran Operasional di KPU Kabupaten Klungkung	57.490.000	3	Risiko Sedang	memastikan bahwa pengelolaan anggaran operasional di KPU terkait sesuai dengan aturan yang berlaku	September 2023	6 orang	potensi tidak/belum lengkapnya SPJ dan terjadinya kesalahan penyimpangan
2	Pemeriksaan Anggaran Operasional di KPU Kabupaten Tulang Bawang	31.062.000	4	Risiko Tinggi	memastikan bahwa pengelolaan anggaran operasional di KPU terkait sesuai dengan aturan yang berlaku	October 2023	6 orang	potensi tidak/belum lengkapnya SPJ dan terjadinya kesalahan penyimpangan
3	Pemeriksaan Anggaran Operasional di KPU Kabupaten Trenggalek	49.215.000	2	Risiko Rendah	memastikan bahwa pengelolaan anggaran operasional di KPU terkait sesuai dengan aturan yang berlaku	October 2023	6 orang	Potensi terdapat fraud krn belum pernah di audit oleh inspektorat
4	Pemeriksaan Anggaran Operasional di KPU Kabupaten Madiun	49.215.000	3	Risiko Sedang	memastikan bahwa pengelolaan anggaran operasional di KPU terkait sesuai dengan aturan yang berlaku	September 2023	6 orang	Potensi terdapat fraud krn belum pernah di audit oleh inspektorat
5	Pemeriksaan Anggaran Operasional di KPU Kabupaten Paser	59.795.000	3	Risiko Sedang	memastikan bahwa pengelolaan anggaran operasional di KPU terkait sesuai dengan aturan yang berlaku	December 2023	6 orang	potensi tidak/belum lengkapnya SPJ dan terjadinya kesalahan penyimpangan
6	Pemeriksaan Anggaran Operasional di KPU Kabupaten Mempawah	62.618.000	3	Risiko Sedang	memastikan bahwa pengelolaan anggaran operasional di KPU terkait sesuai dengan aturan yang berlaku	July 2023	6 orang	potensi terjadi fraud karena belum pernah di audit oleh Inspektorat Utama
7	Pemeriksaan Anggaran Operasional di KPU Kabupaten Maluku Tengah	86.605.000	4	Risiko Tinggi	memastikan bahwa pengelolaan anggaran operasional di KPU terkait sesuai dengan aturan yang berlaku	November 2023	6 orang	potensi terjadi fraud karena belum pernah di audit oleh Inspektorat Utama
8	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu di KPU Wilayah Jawa Timur	46.735.000	4	Risiko Tinggi	PD TT	November	6 orang	permasalahan akan berkembang luas dan dianggap Inspektorat tidak peka atas permasalahan yang timbul
9	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu di KPU Wilayah Kalimantan Timur	56.093.000	4	Risiko Tinggi	memfasilitasi pelaporan masyarakat dan atau kasus yang terjadi di Wilayah terkait	Juni s.d Desember 2023	6 orang	permasalahan akan berkembang luas dan dianggap Inspektorat tidak peka atas permasalahan yang timbul
10	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu di KPU Wilayah Provinsi Papua Barat	69.480.000	3	Risiko Sedang	PD TT	September 2023	7 orang	permasalahan akan berkembang luas dan dianggap Inspektorat tidak peka atas permasalahan yang timbul
11	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu di KPU Wilayah Provinsi Sumatera Utara (Simalungun)	47.872.000	4	Risiko Tinggi	PD TT	August 2023	6 orang	permasalahan akan berkembang luas dan dianggap Inspektorat tidak peka atas permasalahan yang timbul
12	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu di KPU Wilayah Provinsi Kalimantan Barat (Provinsi Kalbar)	39.820.000	4	Risiko Tinggi	PD TT	October 2023	7 orang	permasalahan akan berkembang luas dan dianggap Inspektorat tidak peka atas permasalahan yang timbul
BK	Laporan Hasil Pengawasan Penjaminan Mutu (Quality Assurance) pada Inspektorat Wilayah 2	891.000.000						
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	891.000.000						
1	Monitoring Tindak Lanjut BPK BPKP Inspektorat dan APIP di Wilayah Provinsi Jawa Timur	42.724.000	3	Risiko Sedang	Monev TL sisa rekomendasi	August 2023	6 orang	rekomendasi pemeriksaan tidak tertindaklanjuti
2	Monitoring Tindak Lanjut BPK BPKP Inspektorat dan APIP di KPU Wilayah Provinsi Kalimantan Timur	54.357.000	4	Risiko Tinggi	mengurangi jumlah rekomendasi atas temuan pemeriksaan	Juni s.d Desember 2023	6 orang	penilaian opini oleh BPK

KODE	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN	DASAR UNIT KERJA/SATKER DITETAPKAN MENJADI SAMPLE KEGIATAN PENGAWASAN					DAMPAK JIKA TIDAK DILAKUKAN PENGAWASAN
			TINGKAT RISIKO	URAIAN RISIKO	TUJUAN KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN	JUMLAH PERSONIL	
3	Monitoring Tindak Lanjut BPK BPKP Inspektorat dan APIP di Wilayah Provinsi Lampung	32.152.000	4	Risiko Tinggi	Sisa rekomendasi BPK, BPKP dan APIP ditindaklanjuti	July 2023	5 orang	Rekomendasi pemeriksaan tidak tertindaklanjuti sehingga mempengaruhi kinerja unit kerja
4	Monitoring Tindak Lanjut BPK BPKP Inspektorat dan APIP di KPU Kabupaten Kalimantan Barat (Kayong Utara)	44.519.000	3	Risiko Sedang	Sisa rekomendasi BPK, BPKP dan APIP ditindaklanjuti	June 2023	5 orang	rekomendasi pemeriksaan tidak tertindaklanjuti
5	Monitoring Tindak Lanjut BPK BPKP Inspektorat dan APIP di KPU Kabupaten Buru	70.750.000	4	Risiko Tinggi	Sisa Rekomendasi BPK dan APIP ditindaklanjuti	August 2023	5 orang	rekomendasi pemeriksaan tidak tertindaklanjuti
6	Monitoring Tindak Lanjut BPK BPKP Inspektorat dan APIP di Wilayah Provinsi Maluku (Malra dan Tual)	70.750.000	4	Risiko Tinggi	Sisa Rekomendasi BPK ditindaklanjuti	June 2023	5 orang	rekomendasi pemeriksaan tidak tertindaklanjuti
7	Monitoring Tindak Lanjut BPK BPKP Inspektorat dan APIP di Wilayah Provinsi Maluku (Buru Selatan)	68.750.000	4	Risiko Tinggi	Sisa Rekomendasi BPK dan APIP ditindaklanjuti	September 2023	5 orang	rekomendasi pemeriksaan tidak tertindaklanjuti
8	Monitoring Tindak Lanjut BPK BPKP Inspektorat dan APIP di Wilayah Provinsi Maluku (Tanimbar)	54.298.000	4	Risiko Tinggi	Sisa Rekomendasi APIP ditindaklanjuti	October 2023	5 orang	rekomendasi pemeriksaan tidak tertindaklanjuti
9	Monitoring Tindak Lanjut BPK BPKP Inspektorat dan APIP di Wilayah Provinsi Papua Barat (Pegunungan Arfak)	83.700.000	3	Risiko Sedang	Sisa rekomendasi BPK, BPKP dan APIP ditindaklanjuti	October 2023	5 orang	rekomendasi pemeriksaan tidak tertindaklanjuti
10	Laporan Hasil Evaluasi LAKIP di Wilayah Provinsi Gorontalo	39.684.000	3	Risiko Sedang	Menilai akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah	August 2023	4 orang	tidak mengetahui nilai akuntabilitas dan peningkatan kinerja pada masing-masing satuan kerja
11	Laporan Hasil Evaluasi LAKIP di Wilayah Provinsi Jawa Timur	34.744.000	3	Risiko Sedang	Menilai akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah	June 2023	4 orang	tidak mengetahui nilai akuntabilitas dan peningkatan kinerja pada masing-masing satuan kerja
12	Laporan Hasil Evaluasi LAKIP di KPU Wilayah DIY	28.868.000	3	Risiko Sedang	Menilai akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah	June 2023	4 orang	tidak mengetahui nilai akuntabilitas dan peningkatan kinerja pada masing-masing satuan kerja
13	Laporan Hasil Evaluasi LAKIP di Wilayah Provinsi Jambi	35.704.000	4	Risiko Tinggi	Menilai akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah	June 2023	4 orang	tidak mengetahui nilai akuntabilitas dan peningkatan kinerja pada masing-masing satuan kerja
14	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan di Wilayah Provinsi Lampung	18.733.000	4	Risiko Tinggi	Menilai penyajian laporan keuangan telah memenuhi SAP	February 2023	5 orang	risiko hasil LK yang tidak sesuai
15	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan di Wilayah Provinsi Jawa Timur	34.744.000	3	Risiko Sedang	Menilai penyajian laporan keuangan telah memenuhi SAP	July 2023	6 orang	risiko hasil LK yang tidak sesuai
16	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur	27.455.000	4	Risiko Tinggi	Menilai penyajian laporan keuangan telah memenuhi SAP	February 2023	4 orang	risiko hasil LK yang tidak sesuai
17	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan di Wilayah Provinsi Maluku	55.082.000	3	Risiko Sedang	Menilai penyajian laporan keuangan telah memenuhi SAP	February 2023	4 orang	risiko hasil LK yang tidak sesuai
18	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara	55.086.000	3	Risiko Sedang	Menilai penyajian laporan keuangan telah memenuhi SAP	July 2023	6 orang	risiko hasil LK yang tidak sesuai
19	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat	38.900.000	4	Risiko Tinggi	Menilai penyajian laporan keuangan telah memenuhi SAP	February 2023	5 orang	risiko hasil LK yang tidak sesuai

**KEGIATAN PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT WILAYAH III
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN	DASAR UNIT KERJA/SATKER DITETAPKAN MENJADI SAMPLE KEGIATAN PENGAWASAN					DAMPAK JIKA TIDAK DILAKUKAN PENGAWASAN
			TINGKAT RISIKO	URAIAN RISIKO	TUJUAN KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN	JUMLAH PERSONIL	
CE	Pengawasan Lainnya Inspektorat Wilayah III	498.068.000						
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	466.068.000						
1	Reviu Pertanggungjawaban Anggaran Dana Hibah Pilkada 2018 pada KPU Kabupaten Katingan	44.850.000	4	Risiko Tinggi	Memberi keyakinan bahwa Pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada 2018 pada KPU Kabupaten Katingan sudah sesuai sebelum dilakukan pemeriksaan oleh BPKP	Oktober s.d November 2023	5	Apabila BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah jadi melakukan PDDT atas permintaan APH Katingan, maka tidak dapat diyakini bahwa SPJ Dana Hibah Pilkada KPU Kabupaten Katingan Sudah Lengkap
2	Pemaparan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada KPU Kabupaten Supiori dengan Polres Supiori	92.550.000	3	Risiko Sedang	Melakukan koordinasi dengan Polres Supiori terkait hasil Audit atas Dana Hibah Pilkada 2018 pada KPU Kabupaten Supiori	Oktober s.d Desember 2023	5	Polres Supiori membutuhkan informasi awal terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah pilkada 2018 KPU Kabupaten Supiori dalam mengantisipasi laporan masyarakat terkait honorarium badan ad hoc pilkada 2018 yang belum dibayarkan
3	Pemeriksaan atas Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Kalimantan Tengah pada KPU Kabupaten Barito Utara	65.715.000	4	Risiko Tinggi	Melakukan Audit atas pertanggungjawaban realisasi belanja Dana Hibah Pilgub Tahun 2018 pada KPU Kabupaten Barito Utara yang berdasarkan hasil Pemeriksaan BPK tidak diyakini kebenarannya	Oktober s.d November 2023	6	Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah tidak dapat ditindaklanjuti
4	Pemeriksaan atas Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Kalimantan Tengah pada KPU Kabupaten Murung Raya	32.276.000	4	Risiko Tinggi	Melakukan Audit atas pertanggungjawaban realisasi belanja Dana Hibah Pilgub Tahun 2018 pada KPU Kabupaten Murung Raya yang berdasarkan hasil Pemeriksaan BPK tidak diyakini kebenarannya	Oktober s.d November 2023	5	Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah tidak dapat ditindaklanjuti
5	Pendampingan Pemeriksaan BPK RI atas LK KPU Tahun 2023 di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan	27.462.000	3	Risiko Sedang	Melakukan Pendampingan BPK di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan	Februari 2023 dan November 2023	3	Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK di Wilayah Sulawesi Selatan tidak dapat ditindaklanjuti
6	Monitoring Pelaksanaan Zona Integritas pada KPU Kabupaten Bandung	37.815.000	4	Risiko Tinggi	Agar pelaksanaan pembangunan Zona Integritas lebih terarah sebelum dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN)	May 2023	4	Tidak lulus seleksi saat di nilai oleh TPN
7	Pengawasan Lainnya pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	35.400.000	4	Risiko Tinggi	Melakukan Reviu atas Pertanggungjawaban Realisasi Belanja pada KPU Provinsi /Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023 dalam mengantisipasi Pemeriksaan BPK RI	Oktober s.d November 2023	4	Apabila BPK melakukan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan KPU Tahun 2022 tidak dilakukan reviu terlebih dahulu maka akan terdapat temuan atas realisasi belanja yang belum terdapat bukti pertanggungjawaban
8	Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat	59.498.000	3	Risiko Sedang	Memastikan bahwa Reformasi Birokrasi pada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah terlaksana dalam rangka mendukung implementasi ZI	July 2023	3	Dalam penilaian TPN terhadap Implementasi ZI pada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak mendukung terpilainya entitas WBK
9	Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	33.046.000	3	Risiko Sedang	Memastikan bahwa unit kerja pada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siap dalam penilaian Implementasi ZI oleh TPN	July 2023	4	Dalam penilaian TPN terhadap Implementasi ZI pada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak mendukung terpilainya entitas WBK
10	Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada KPU Provinsi Sumatera Barat	37.456.000	3	Risiko Sedang	Memastikan bahwa unit kerja pada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Barat siap dalam penilaian Implementasi ZI oleh TPN	July 2023	4	Dalam penilaian TPN terhadap Implementasi ZI pada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Barat tidak mendukung terpilainya entitas WBK
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Inspektorat Wilayah III	32.000.000						
1	Reviu Pertanggungjawaban Anggaran APBN TA 2021 pada Pusat Data dan Teknologi Informasi	32.000.000	4	Risiko Tinggi	Melakukan Reviu dalam rangka keyakinan terbatas atas Pertanggungjawaban Realisasi Belanja pada Pusdatin untuk mengantisipasi Pemeriksaan BPK RI	Juni s.d Desember 2023	6	Apabila BPK melakukan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan KPU Tahun 2022 tidak dilakukan reviu terlebih dahulu maka akan terdapat temuan atas realisasi belanja yang belum terdapat bukti pertanggungjawaban
CJ		253.000.000						
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	253.000.000						
1	Pemeriksaan Operasional di Wilayah Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Kuningan)	29.002.000	4	Risiko Tinggi	Memastikan pelaksanaan anggaran telah dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalam rangka menilai aspek ekonomis, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pemerintahan	June 2023	6	Kemungkinan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, mengingat satker tidak pernah diperiksa oleh APIP
2	Pemeriksaan Operasional di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (KPU Kabupaten Luwu)	51.998.000	3	Risiko Sedang	Melakukan Audit atas pertanggungjawaban realisasi belanja pada KPU Kabupaten Luwu	November-Desember 2023	5	Dapat berdampak resiko sedang, dan memang KPU Kabupaten Luwu jarang dilakukan pemeriksaan baik dengan BPK, BPKP maupun APIP
3	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu di Wilayah Provinsi Sumatera Barat	52.548.000	4	Risiko Tinggi	Melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas arahan pimpinan atas permasalahan di KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat	Oktober s.d Desember 2023	5	Tidak dapat memberikan saran kepada pimpinan terhadap permasalahan yang terjadi di KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat
4	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	54.857.000	3	Risiko Sedang	Melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas arahan pimpinan atas permasalahan di KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan	December 2023	5	Tidak dapat memberikan saran kepada pimpinan terhadap permasalahan yang terjadi di KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan
5	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan	64.595.000	3	Risiko Sedang	Melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas arahan pimpinan atas permasalahan di KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan	November-Desember 2023	6	Tidak dapat memberikan saran kepada pimpinan terhadap permasalahan yang terjadi di KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
CK	Laporan Hasil Pengawasan Penjaminan Mutu (Quality Assurance) pada Inspektorat Wilayah	1.412.432.000						

KODE	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN	DASAR UNIT KERJA/SATKER DITETAPKAN MENJADI SAMPLE KEGIATAN PENGAWASAN					DAMPAK JIKA TIDAK DILAKUKAN PENGAWASAN
			TINGKAT RISIKO	URAIAN RISIKO	TUJUAN KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN	JUMLAH PERSONIL	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.412.432.000						
1	Monitoring Tindak lanjut Pemeriksaan BPK BPKP dan APIP KPU di Wilayah Provinsi Sumatera Barat	47.730.000	3	Risiko Sedang	Melakukan verifikasi atas Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat	Juli s.d November 2023	4	Rekomendasi Hasil Pengawasan tidak dapat ditindaklanjuti
2	Monitoring Tindak lanjut Pemeriksaan BPK BPKP dan APIP KPU di KPU Kabupaten Lahat	60.435.000	4	Risiko Tinggi	Melakukan verifikasi atas Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada KPU Kabupaten Lahat	Juli-Agustus 2023	7	Rekomendasi Hasil Pengawasan tidak dapat ditindaklanjuti
3	Monitoring Tindak lanjut Pemeriksaan BPK BPKP dan APIP KPU di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Musi Rawas)	48.224.000	3	Risiko Sedang	Melakukan verifikasi atas Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada KPU Kabupaten Musi rawas	Juli-Agustus 2023	5	Rekomendasi Hasil Pengawasan tidak dapat ditindaklanjuti
4	Monitoring Tindak lanjut Pemeriksaan BPK BPKP dan APIP KPU di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Kab. Musi Banyuasin)	45.690.000	3	Risiko Sedang	Melakukan verifikasi atas Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada KPU Kabupaten Musi Banyuasin	September-Oktober 2023	5	Rekomendasi Hasil Pengawasan tidak dapat ditindaklanjuti
5	Monitoring Tindak lanjut Pemeriksaan BPK BPKP dan APIP KPU di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Provinsi Sumatera Selatan)	44.816.000	3	Risiko Sedang	Melakukan verifikasi atas Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada KPU Provinsi Sumatera Selatan	September-Oktober 2023	5	Rekomendasi Hasil Pengawasan tidak dapat ditindaklanjuti
6	Monitoring Tindak lanjut Pemeriksaan BPK BPKP dan APIP KPU di Wilayah Provinsi Bangka Belitung	44.692.000	3	Risiko Sedang	Melakukan verifikasi atas Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Juli s.d November 2023	4	Rekomendasi Hasil Pengawasan tidak dapat ditindaklanjuti
7	Monitoring Tindak lanjut Pemeriksaan BPK BPKP dan APIP KPU di KPU Kab. Sukabumi	28.866.000	5	Risiko Sangat Tinggi	Melakukan verifikasi atas Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada KPU Kabupaten Sukabumi	Juli-Agustus 2023	5	Rekomendasi Hasil Pengawasan tidak dapat ditindaklanjuti
8	Monitoring Tindak lanjut Pemeriksaan BPK BPKP dan APIP KPU di Wilayah Provinsi Jawa Barat (Cianjur)	27.866.000	4	Risiko Tinggi	Melakukan verifikasi atas Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada KPU Kabupaten Cianjur	Juli-Agustus 2023	5	Rekomendasi Hasil Pengawasan tidak dapat ditindaklanjuti
9	Monitoring Tindak lanjut Pemeriksaan BPK BPKP dan APIP KPU di Wilayah Provinsi Jawa Barat (Indramayu)	25.748.000	5	Risiko Sangat Tinggi	Melakukan verifikasi atas Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada KPU Kabupaten Indramayu	September 2023	5	Rekomendasi Hasil Pengawasan tidak dapat ditindaklanjuti
10	Monitoring Tindak lanjut Pemeriksaan BPK BPKP dan APIP KPU di KPU Kabupaten Seruyan	29.736.000	3	Risiko Sedang	Melakukan verifikasi atas Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada KPU Kabupaten Seruyan	Juli s.d November 2023	4	Rekomendasi Hasil Pengawasan tidak dapat ditindaklanjuti
11	Monitoring Tindak lanjut Pemeriksaan BPK BPKP dan APIP KPU di KPU Provinsi Kalimantan Utara	57.758.000	4	Risiko Tinggi	Melakukan verifikasi atas Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di KPU Provinsi Kalimantan Utara	Juli - Agustus 2023	5	Rekomendasi Hasil Pengawasan tidak dapat ditindaklanjuti
12	Monitoring Tindak lanjut Pemeriksaan BPK , BPKP, APIP Sulawesi Selatan	55.054.000	3	Risiko Sedang	Melakukan verifikasi atas Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan	August 2023	5	Rekomendasi Hasil Pengawasan tidak dapat ditindaklanjuti
13	Monitoring Tindak lanjut Pemeriksaan BPK BPKP dan APIP KPU di KPU Provinsi Sulawesi Barat	62.156.000	3	Risiko Sedang	Melakukan verifikasi atas Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Barat	Juli s.d November 2023	5	Rekomendasi Hasil Pengawasan tidak dapat ditindaklanjuti
14	Monitoring Tindak lanjut Pemeriksaan BPK BPKP dan APIP KPU di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	66.404.000	4	Risiko Tinggi	Melakukan verifikasi atas Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Agustus - September 2023	5	Rekomendasi Hasil Pengawasan tidak dapat ditindaklanjuti
15	Monitoring Tindak lanjut Pemeriksaan BPK BPKP dan APIP KPU di KPU Kabupaten Mamberamo Raya	87.770.000	4	Risiko Tinggi	Melakukan verifikasi atas Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada KPU Kabupaten Mamberamo Raya	Juli s.d November 2023	5	Rekomendasi Hasil Pengawasan tidak dapat ditindaklanjuti
16	Monitoring Tindak lanjut Pemeriksaan BPK BPKP dan APIP KPU di KPU Kota Jayapura	70.216.000	4	Risiko Tinggi	Melakukan verifikasi atas Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada KPU Kota Jayapura	Juli s.d November 2023	4	Rekomendasi Hasil Pengawasan tidak dapat ditindaklanjuti
17	Monitoring Tindak lanjut Pemeriksaan BPK BPKP dan APIP KPU di KPU Kabupaten Kotawaringin Barat	45.850.000	3	Risiko Sedang	Melakukan verifikasi atas Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada KPU Kabupaten Kotawaringin Barat	Juli s.d November 2023	5	Rekomendasi Hasil Pengawasan tidak dapat ditindaklanjuti
18	Monitoring Tindak lanjut Pemeriksaan BPK BPKP dan APIP KPU di KPU Kabupaten Tana Tidung	60.135.000	3	Risiko Sedang	Melakukan verifikasi atas Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada KPU Kabupaten Tana Tidung	Juli - Agustus	5	Rekomendasi Hasil Pengawasan tidak dapat ditindaklanjuti
19	Monitoring Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada KPU Provinsi Papua	91.696.000	3	Risiko Sedang	Memberikan sosialisasi, pengarahan dan bimbingan teknis terhadap Pengendalian Intern di Lingkungan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Papua dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran	Agustus - Desember 2023	4	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban realisasi belanja pada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua tidak dapat diyakini kelengkapan dokumen pendukung dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan
20	Monitoring Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada KPU Provinsi Sulawesi Barat	50.190.000	4	Risiko Tinggi	Memberikan sosialisasi, pengarahan dan bimbingan teknis terhadap Pengendalian Intern di Lingkungan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran	Agustus - Desember 2023	4	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban realisasi belanja pada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Barat tidak dapat diyakini kelengkapan dokumen pendukung dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan
21	Monitoring Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	42.114.000	4	Risiko Tinggi	Memberikan sosialisasi, pengarahan dan bimbingan teknis terhadap Pengendalian Intern di Lingkungan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran	Agustus - Desember 2023	4	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban realisasi belanja pada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak dapat diyakini kelengkapan dokumen pendukung dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan
22	Evaluasi SAKIP Tahun 2021 pada KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU Kota Padang	56.018.000	3	Risiko Sedang	Melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU Kota Padang Tahun 2022	Juni - Juli 2023	3	Tidak dapat memberikan keyakinan terhadap laporan kinerja pada lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU Kota Padang Tahun 2022

KODE	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN	DASAR UNIT KERJA/SATKER DITETAPKAN MENJADI SAMPLE KEGIATAN PENGAWASAN					DAMPAK JIKA TIDAK DILAKUKAN PENGAWASAN
			TINGKAT RISIKO	URAIAN RISIKO	TUJUAN KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN	JUMLAH PERSONIL	
23	Evaluasi SAKIP Tahun 2021 pada KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dan KPU Kota Mataram	47.399.000	3	Risiko Sedang	Melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dan KPU Kota Mataram Tahun 2022	Juni - Juli 2023	3	Tidak dapat memberikan keyakinan terhadap laporan kinerja pada lingkungan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dan KPU Kota Mataram Tahun 2022
24	Evaluasi SAKIP Tahun 2021 pada KPU Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Mamuju	52.583.000	3	Risiko Sedang	Melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada KPU Provinsi Sulawesi Barat dan KPU Kabupaten Mamuju Tahun 2022	June 2023	3	Tidak dapat memberikan keyakinan terhadap laporan kinerja pada lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Barat dan KPU Kabupaten Mamuju Tahun 2022
25	Penjaminan Mutu (Quality Assurance) pada KPU Provinsi Papua	83.848.000	3	Risiko Sedang	Memberikan konsultasi/sosialisasi/bimbingan teknis kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Papua	Juli - Agustus 2023	3	Kendala dan Permasalahan atas pengelolaan keuangan pada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Papua tidak diketahui dan diselesaikan
26	Evaluasi SAKIP Tahun 2022 dan Monitoring Tindak Lanjut ZI pada Wilayah Sulawesi Selatan	38.416.000	4	Risiko Tinggi	Melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada KPU Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022	June 2023	4	Kendala dan Permasalahan atas pengelolaan keuangan pada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tidak diketahui dan diselesaikan
27	Penjaminan Mutu (Quality Assurance) pada KPU Provinsi Sulawesi Barat	41.022.000	4	Risiko Tinggi	Memberikan konsultasi/sosialisasi/bimbingan teknis kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat	Juli - Agustus 2023	3	Kendala dan Permasalahan atas pengelolaan keuangan pada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat tidak diketahui dan diselesaikan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 27 Juni 2023

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

BERNAD DERMAWAN SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna